



**Laporan Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah (LAKIP)
DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah adalah salah satu badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Lampung Tengah dalam Bidang Pengendalian Penduduk dan Program Keluarga Berencana Nasional.

Dengan telah selesainya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Tahun 2023, kami haturkan puji syukur dengan segala limpahan dan rahmat-NYA sehingga dapat terselesaikan sesuai yang diharapkan.

LAKIP ini merupakan laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijakan sehingga dapat ditarik suatu langkah yang lebih tepat sesuai dengan situasi kondisi dan kebutuhan.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini disusun, semoga dapat member manfaat dan menjadi acuan laporan keuangan bagi kami khususnya dan kepentingan pemerintah daerah umumnya, namun dalam penyusunan ini belumlah sempurna dan kami harapkan masukannya demi penyempurnaan selanjutnya. Dan kepada pihak yang telah membantu menyelesaikan laporan ini, kami sampaikan terimakasih.

Gunung Sugih, Januari 2024

Plt.KEPALA DINAS PENGENDALIANPENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH


A. RAHMAN, S.Pd., MM
Pembina TK.I / (IV/b)
NIP. 19660917 198903 1 004

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Landasan Hukum.....	2
	C. Maksud dan Tujuan.....	4
	D. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5
	E. Issue Strategis	15
BAB II	PERENCANAAN KINERJA.....	17
	A. Rencana Strategis.....	17
	B. Visi dan Misi.....	18
	C. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	19
	D. Indikator Kinerja.....	19
	E. Perjanjian Kinerja.....	20
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
	A. Capaian Kinerja Organisasi	27
	B. Realisasi Anggaran.....	55
BAB IV	PENUTUP.....	61
	A. Kesimpulan.....	61
	B. Strategi Peningkatan Kinerja.....	62

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun, dan merupakan salah satu bentuk manivestasi dan evaluasi semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran. Semua rangkaian kegiatan tersebut harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain itu sebagai bahan pijakan dan pedoman dalam penyusunan langkah – langkah kegiatan pada tahun berikutnya.

Laporan tahunan yang disusun secara hierarki dan sistematis, merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijakan, sehingga dapat ditarik suatu langkah yang lebih tepat sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan diimplementasikan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, di mana pada akhirnya pengelolaan KB berdiri sendiri, yang semula berupa Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sementara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Dinas tersendiri.

Lingkup tugas kerja perangkat daerah baru ini telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Secara spesifik, wewenang pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diimplementasikan ke

dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Contoh tugas dan fungsi beberapa program dan kegiatan sebagaimana RPJPM Kabupaten Lampung Tengah antara lain :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

B. Landasan Hukum

Dasar hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom.
9. Peraturan Pemerintah No 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014.
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
15. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 Tentang pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lampung Tengah sebagai Daerah Otonom.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pengarusutamaan Gender.

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No 10 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
23. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah 2024, dimaksudkan untuk menyediakan dokumen pelaporan, baik laporan kinerja maupun laporan keuangan, sebagai acuan keberhasilan pencapaian kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2024.

2. Tujuan

- a. Memberikan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, dalam pelaksanaan program kegiatan tahun 2024 sebagai upaya intervensi permasalahan Kependudukan dan Keluarga Berencana, dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Lampung Tengah secara sinergis, koordinatif, terpadu dan berkelanjutan.
- b. Menyediakan tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan program Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

D. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2023, Tugas Pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah membantu

Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sedangkan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah menyelenggarakan kegiatan, dalam bidang sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- d. Pembinaan Pelaksanaan tugas di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Bupati dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Lampung Tengah. Sedangkan untuk kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris sebagai fungsi staf dan Kepala Bidang sebagai fungsi lini.

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Kelompok Jabatan Fungsional

- c. Bidang Pengendalian Penduduk**, terdiri dari :
Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Keluarga Berencana** Terdiri dari :
Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**,
terdiri dari : Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan**, terdiri dari :
Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit Pelaksana Teknis**
- h. Kelompok Jabatan Fungsional** terdiri dari sejumlah jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

3. Gambaran Umum Daerah

a. Penduduk

Penduduk dapat diidentifikasi sebagai orang yang bertempat tinggal secara defakto selama minimal 6 bulan berturut turut atau warga Lampung Tengah yang terdaftar dalam daftar / kartu keluarga dan secara administratif yuridis masih berstatus warga Kabupaten Lampung Tengah. Wilayah Kabupaten Lampung Tengah secara administratif memiliki 28 Kecamatan dan 311 Kampung, dengan Jumlah Peduduk tahun 2023 sebanyak 1.378.441 jiwa, dengan jumlah laki-laki 702.991 Jiwa dan perempuan 675.450 jiwa (sumber Dinas Catatan Sipil Kab. Lampung Tengah), merupakan daerah berkembang serta cukup terbuka dan merupakan daerah penyangga utama Ibu Kota Provinsi Lampung yang memiliki kecenderungan dan potensi pertumbuhan yang cukup tinggi.

b. Kepala Keluarga

Kepala Keluarga merupakan unit terkecil di dalam masyarakat yang terdiri :

1. Pasangan Suami Istri yang diikat secara sah berdasarkan hukum agama yang berlaku, beserta anak anaknya.
2. Ayah saja dan atau beserta anak anaknya.
3. Ibu saja dan beserta anak anaknya.
4. Kepala Keluarga Khusus (Kakak yang belum menikah yang hidup dan tinggal bersama adiknya yang belum menikah karena yatim piatu.

Hasil Pendataan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 menunjukkan, bahwa jumlah Kepala Keluarga di Lampung Tengah sebesar 330.077, jumlah ini menginformasikan terjadi penurunan jumlah kepala keluarga sebesar 466.732 kepala keluarga dari kondisi tahun 2022.

c. Pasangan Usia Subur

PUS atau Pasangan Usia Subur adalah KK Kawin yang istrinya berusia 15 – 49 tahun. Selanjutnya pada tahun 2023 menunjukkan jumlah PUS sebesar 199.282 pasangan, dibanding tahun 2022 yang berjumlah 186.184 pasangan.

Penambahan jumlah pasangan usia subur baru, menyiratkan adanya potensi bertambahnya jumlah jiwa (bayi) yang akan dilahirkan, yang tentunya akan membawa berbagai dampak dalam pengembangan Program KB. PUS sendiri dalam pelaksanaannya di bagi menjadi kelompok-kelompok umur.

d. Kondisi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Upaya mengendalikan kelahiran penduduk bagi pasangan Usia Subur harus selalu diiringi dengan upaya pendewasaan Usia Perkawinan, karena pertambahan keikutsertaan ber KB akan menjadi kurang bermanfaat jika banyak kaum muda yang menikah di Usia Remaja (dibawah usia < 20 tahun). Remaja dengan segala dinamikanya memerlukan wadah yang dapat menampung berbagai hal berkenaan

dengan problematika kehidupannya. Wadah ini diharapkan menjadi bagian dalam membantu memecahkan masalah yang diakibatkan karena kehidupan Remaja, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.

Pengalaman mengajarkan, bahwa melalui media seperti ini, para remaja dapat mencurahkan isi hati dan problem pribadi kepada para kader yang sudah dilatih untuk memberikan advokasi.

Masalah yang dikonsultasikan beragam antara lain: kesehatan alat reproduksi manusia, pencegahan kehamilan sebelum menikah, kehamilan yang tidak diinginkan yang berlanjut pada aborsi, pencegahan penyakit menular akibat hubungan seksual seperti gonorrhoe/HIV/AIDS, permasalahan akibat penggunaan obat – obatan adiktif serta narkoba, sampai hubungan dengan sesama remaja pria dan wanita.

Dengan melindungi kerahasiaan masalahnya, maka para remaja dan anak – anak muda banyak yang dapat diberikan advokasi karena tingginya kepercayaan kepada para kader PIK-KRR.

Pemberian pelayanan KIE untuk KRR ini tidak dibatasi pada kepentingan individu, namun juga dilakukan KIE kelompok melalui beberapa Sekolah Menengah Pertama dan Menengah Umum bahkan dibeberapa pondok pesantren. Saat ini beberapa lembaga pendidikan setingkat SMU memanfaatkan guru BP sebagai tenaga KIE, dan pondok pesantren yang memiliki PIK dan KRR.

Pada tahun 2008 telah dibentuk Pusat Informasi dan konsultasi Remaja (PIK-R) sebanyak 33 buah dengan 80 orang tenaga yang sudah dilatih dan tersebar di 28 Kecamatan. Pada tahun 2023 telah berkembang sebanyak 100 PIK-R. Jumlah tersebut akan terus dikembangkan disetiap Kampung/Kelurahan, dimasa yang akan datang,

dengan memiliki 2 unit kegiatan PIK-R, para kader akan memberikan rujukan kepada audiencenya yang memerlukan pemecahan masalah, baik secara medis atau sarana pelayanan kesehatan lainnya.

e. Kondisi Kesertaan Ber – KB

Tabel Data Pasangan Usia Subur dan Jumlah peserta KB Aktif Tahun 2023

KODE	KECAMATAN	PASANGAN USIA SUBUR (PUS)	JUMLAH PESERTA KB AKTIF	CPR
1	2	3	3=12+13	5=4/3*100
01	KALIREJO	12085	7723	63.91
02	BANGUN REJO	9986	7061	70.71
03	PADANG RATU	8620	6357	73.75
04	GUNUNG SUGIH	10625	8542	80.40
05	TRIMURJO	8775	6654	75.83
06	PUNGGUR	7496	5653	75.41
07	TERBANGGI BESAR	15491	9583	61.86
08	SEPUTIH RAMAN	7493	5482	73.16
09	RUMBIA	5958	3981	66.82
10	SEPUTIH BANYAK	4467	3428	76.74
11	SEPUTIH MATARAM	6050	3940	65.12
12	SEPUTIH SURABAYA	7516	6076	80.84
13	TERUSAN NUNYAI	8324	5131	61.64
14	BUMI RATU NUBAN	5682	4286	75.43
15	BEKRI	4448	3326	74.78
16	SEPUTIH AGUNG	10062	7583	75.36
17	WAY PANGUBUAN	7705	5238	67.98
18	BANDAR MATARAM	7969	4238	53.18
19	PUBIAN	7727	5472	70.82
20	SELAGAI LINGGA	4686	3285	70.10
21	ANAK TUHA	6163	3980	64.58
22	SENDANG AGUNG	4698	2914	62.03
23	KOTA GAJAH	5604	3867	69.00
24	BUMI NABUNG	6739	4725	70.11
25	WAY SEPUTIH	3896	3085	79.18
26	BANDAR SURABAYA	4815	3670	76.22
27	ANAK RATU AJI	2655	2183	82.22
28	PUTRA RUMBIA	3547	2534	71.44
JUMLAH TOTAL		199282	139997	70.25

Kondisi Penduduk secara spesifik, dilihat dari sasaran dalam partisipasi menggunakan alat kontrasepsi, berdasarkan statistik rutin tahun 2022

yaitu sebesar 122.400 akseptor, sedangkan tahun 2023 sebesar 139.997 akseptor, meningkat sebesar 17.597 akseptor, dikarenakan jumlah PUS meningkat dari 186.184 pasangan menjadi 199.282 pasangan (sumber data dari New SIGA Dinas PP dan KB Kab. Lampung Tengah).

Tabel Metode Kontrasepsi Tahun 2023

NO	KECAMATAN	METODE KONTRASEPSI MODERN									METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL
		SUNTIK	PIL	KONDOM	IMPLAN	IUD	VASEKTOMI	TUBEKTOMI	MAL	TOTAL	
1	KALIREJO	4566	1356	148	1040	428	2	109	4	7653	70
2	BANGUN REJO	4331	826	139	1148	511	3	83	1	7042	19
3	PADANG RATU	4273	767	72	1084	96	3	57	0	6352	5
4	GUNUNG SUGIH	4347	1481	150	2019	445	6	86	1	8535	7
5	TRIMURJO	3969	1228	112	964	194	1	132	1	6601	53
6	PUNGGUR	3307	1115	110	812	150	16	125	0	5635	18
7	TERBANGGI BESAR	6189	1433	118	883	632	7	246	7	9515	68
8	SEPUTIH RAMAN	3172	1091	103	860	105	4	131	0	5466	16
9	RUMBIA	1812	668	124	908	327	25	99	8	3971	10
10	SEPUTIH BANYAK	2140	588	98	505	42	1	32	0	3406	22
11	SEPUTIH MATARAM	2487	533	75	692	73	7	61	0	3928	12
12	SEPUTIH SURABAYA	3101	1225	77	1586	46	4	28	0	6067	9
13	TERUSAN NUNYAI	2840	1015	148	829	181	1	95	1	5110	21
14	BUMI RATU NUBAN	2394	1065	137	604	48	2	29	0	4279	7
15	BEKRI	2053	536	69	537	69	1	51	0	3316	10
16	SEPUTIH AGUNG	4292	1075	142	1780	160	7	59	2	7517	66
17	WAY PANGUBUAN	3198	1185	152	580	56	7	48	0	5226	12
18	BANDAR MATARAM	2699	613	69	693	126	0	18	1	4219	19
19	PUBIAN	3890	556	65	742	135	5	43	2	5438	34
20	SELAGAI LINGGA	2030	441	37	746	21	0	8	0	3283	2
21	ANAK TUHA	2329	523	88	955	41	1	33	1	3971	9
22	SENDANG AGUNG	1976	299	47	525	44	0	11	0	2902	12
23	KOTA GAJAH	2427	502	63	627	163	1	74	0	3857	10
24	BUMI NABUNG	2911	749	60	817	152	2	29	0	4720	5

25	WAY SEPUTIH	1916	647	54	419	34	0	12	0	3082	3
26	BANDAR SURABAYA	2099	1069	34	389	25	9	34	2	3661	9
27	ANAK RATU AJI	1096	231	66	735	25	2	6	0	2161	22
28	PUTRA RUMBIA	1185	678	130	458	52	0	25	1	2529	5
		83029	23495	2687	23937	4381	117	1764	32	139442	555

Dari data Peserta KB metode Kontrasepsi Modern diatas terdapat perbandingan antara jumlah akseptor KB wanita dan KB Pria yang terlihat sangat jelas. Untuk jumlah peserta KB metode kontrasepsi modern dari total seluruhnya yaitu 139.442, untuk peserta KB wanita (Suntik, Pil, Implan, IUD, Tubektomi dan MAL) berjumlah 136.638 dan untuk peserta KB pria (Kondom, Vasektomi) yaitu 2.784, jumlah tersebut terdapat selisih 2 dari total jumlah peserta KB modern.

Dengan ditunjang pelayanan aktif dari 81 klinik KB Pemerintah, yang terdiri dari 46 faskes Pemerintah dan 35 faskes swasta dan 3 rumah sakit rujukan Poliklinik KB Rumah Sakit (PKBRS), pelayanan ulangan yang melibatkan tenaga medis diberbagai tingkatan, sampai bantuan yang diberikan oleh SUB-PPKBD sebanyak 1433 dan PPKBD sebanyak 336, yang bertugas untuk menyalurkan alat kontrasepsi Pil dan Kondom kepada para akseptor KB aktif, diharapkan dapat terus meningkatkan kepedulian masyarakat dalam ber-KB.

f. Pemberdayaan dalam kelembagaan

Pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas keluarga merupakan salah satu program pembangunan Keluarga Berencana yang dapat meminimalisir hasil- hasil sektor lainnya, karena pada dasarnya peledakan jumlah pertumbuhan penduduk akan menjadi beban pembangunan baik secara daerah maupun nasional.

Oleh karena itu, berbagai upaya dan kegiatan agar masyarakat lebih peduli dan berperan aktif terhadap program KB, telah menjadi komitmen pemerintah sejak awal dilaksanakannya program KB di tengah – tengah masyarakat.

Potensi sumber daya manusia pengelola KB, yang disebut Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), sangat berperan besar dalam penyampaian berbagai hal dan kegiatan yang berkenaan dengan masalah – masalah KB. Kegiatan IMP meliputi, membantu pencatatan kegiatan dan pelaporan hasil capaian program, konseling dan penyuluhan, pembinaan pada Pasangan Usia Subur (PUS) dan non PUS, membantu rujukan bagi peserta KB yang mengalami kegagalan/komplikasi dan efek samping penggunaan alat kontrasepsi, serta melakukan pendataan keluarga.

Institusi Masyarakat Pedesaan disebut juga kader, saat ini tercatat yang berperan aktif adalah 336 pembantu petugas KB di desa (PPKBD), 1433 Sub PPKBD berada di tingkat Dusun/RW, Kader Posyandu serta kader-kader lain yang membina pancabina (Bina Keluarga Balita/BKB) sebanyak 256 kelompok, Bina keluarga remaja/BKR 214 Kelompok, dan bina Keluarga Lansia/BKL 225 kelompok dan Kelompok UPPKA sebanyak 162 kelompok.

Kelompok Bina Keluarga Balita, sebagai salah satu institusi pengelola anggota keluarga, diberikan pelatihan mengelola kelompok dan memanfaatkan alat-alat permainan edukatif bagi para balita yang menjadi sasaran kegiatan. Kelompok – kelompok ini agar dapat memiliki kegiatan yang berkelanjutan, diberikan bantuan peralatan APE (Alat Permainan Edukatif) bagi balita dan alat alat pendukung BKB lainnya.

Selain IMP diatas, pelayanan Program KB juga ditangani oleh para provider yang meliputi 282 Bidan Praktek Swasta dan 89 Dokter Praktek swasta, serta sarana pelayanan KB lainnya yaitu 81 Klinik KB

Pemerintah, 35 Klinik KB swasta, dan 1 Poliklinik KB Rumah Sakit Pemerintah (RSUD Demang Sepulau Raya Gunung Sugih) serta 2 Poliklinik KB RS Swasta (RS Asy-Syifa Bandar Jaya) dan RS Yukum Medikal Center.

Semua kegiatan dilapangan, dikendalikan dan digerakkan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang berjumlah 80 orang untuk tingkat Kampung/Kelurahan dan 27 Pengendali PLKB (PPLKB), yang pada tahun 2007 resmi menjadi KUPT dengan Eselon IV-a yang mengendalikan program Keluarga Berencana ditingkat Kecamatan.

Sebagai upaya dalam memperkuat, dan memperluas jejaring kemitraan, Pelaksanaan program Keluarga Berencana juga mengikutsertakan serta diberi dukungan oleh mitra kerja strategis yang dapat membantu meningkatkan kepedulian dalam program KB, serta melakukan kegiatan pada momentum tertentu antara lain;

- Manunggal TNI-KB-Kesehatan
- Bhayangkara-KB-Kesehatan
- KESRAK PKK-KB-Kesehatan
- Bhakti PGRI-KB
- Operasionalisasi PKBI-KB-Generasi Muda
- Bhakti IBI
- Bhakti IDI
- Pramuka Saka Kencana

Selanjutnya berbagai unit kegiatan seperti Karang Taruna, Kelompok LSM Pemuda/Wanita, Para Ulama dan Penyeimbang Adat, organisasi keagamaan serta berbagai perusahaan, dilakukan pendekatan agar lebih peduli terhadap program KB.

g. Pelembagaan Program KB Nasional

Selain pelembagaan yang bersifat struktural, dengan pembentukan kelompok-kelompok binaan dan kelompok kegiatan yang ditetapkan dalam mekanisme

operasional penggarapan program KB, kegiatan pelebagaan diperluas cakupannya, sehingga dapat memberikan daya ungkit terhadap pelebagaan secara struktural.

Salah satu bentuk perluasan pelebagaan adalah melakukan lomba terhadap para institusi masyarakat di pedesaan, dengan mengukur keterlibatan, aktifitas serta prestasi dalam mendukung pelaksanaan program KB di Kabupaten Lampung Tengah, dan selanjutnya menjadi teladan dalam pengelolaan maupun pertisipasinya bagi para pengelola Program KB lainnya baik di Kecamatan yang bersangkutan maupun di tingkat Kabupaten, untuk selanjutnya dipilih sebagai IMP Pengelola KB berprestasi dan kepedulian (Teladan) I, Pengelola KB berprestasi (Teladan) II, dan Pengelola KB berprestasi (Teladan) III.

h. Pembudayaan Program KB.

Sebagai upaya memperluas KIE dengan misi semua keluarga ikut KB, maka berbagai kegiatan harus dapat diakses oleh segenap masyarakat, yang selanjutnya meningkatkan kepeduliannya dalam pelaksanaan program KB, dan menjadi budaya dalam perencanaan keluarga dimasa depan yang lebih berkualitas.

Bentuk – bentuk kegiatan yang dilakukan dalam pembudayaan KB adalah :

- Memilih BKB Kelompok dan BKB Kader, yang dianggap dapat melakukan pembinaan anggotanya yang dipresentasikan dalam pengelolaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga.
- Memilih BKB Pengelola, yang dianggap dapat melakukan pembinaan anggotanya yang dipresentasikan dalam pengelolaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga.

- Memilih Keluarga Lansia yang memiliki peranan maksimal dalam pembinaan keluarga menuju keluarga berkualitas.

E. Issue Strategis.

Issue strategis yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah dalam mengemban misi organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Masalah utama yang dihadapi pada sektor pengendalian penduduk adalah terbatasnya kualitas Sumber daya manusia dalam merencanakan program dan kegiatan di bidang pengendalian penyuluhan dan pergerakan.
- b. Kurangnya informasi data keluarga pada setiap keluarga.
- c. Kurangnya sarana dan prasarana pada bidang pengendalian penduduk.
- d. Perlunya pemutakhiran data dan informasi yang akurat setiap tahun.
- e. Kurangnya tenaga penyuluh keluarga berencana dibandingkan dengan luas wilayah, hal ini terbukti sampai saat ini tinggal 80 tenaga penyuluh (38,21%) yang seharusnya 157 orang dimana setidaknya satu penyuluh membina 2 kampung
- f. Belum maksimalnya layanan KB di wilayah terpencil dan tertinggal.
- g. Belum maksimalnya pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi ke faskes dan masyarakat.
- h. Kurangnya sarana dan prasarana di bidang Kesejahteraan Keluarga.
- i. Program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (bina ketahanan remaja, bina keluarga sejahtera, bina ketahanan keluarga balita, belum dilaksanakan secara komprehensif lintas sektor).
- j. Terbatasnya akses informasi remaja putus sekolah tentang kesehatan reproduksi.

- k. Masih kurangnya pembentukan pengembangan pusat konseling dan KRR yang ada disekolah maupun diluar sekolah.
- l. Kurangnya pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan, agar dapat menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pada prinsipnya, setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, hambatan dan tantangan, serta tujuan yang belum tercapai. Semua pegawai, mempunyai peran yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja merupakan suatu syarat mutlak demi maksimalnya pelayanan (*client service*), baik internal maupun eksternal. Kualitas keterampilan atau skill pegawai selaku pelaksana tugas, tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsinya. Tak dapat dipungkiri pula bahwa kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan tak kalah pentingnya guna kelancaran tugas dan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut yang masih sangat terbatas.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good goverment* dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara, di mana salah satunya adalah terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dengan disusunnya suatu bentuk rencana strategis yang berbasis kinerja, yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, agar tujuan peningkatkan kinerja dan peningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat dapat tercapai.

Penyusunan rencana dan program, pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Adapun sasaran dan tujuan mengandung pengertian bahwa, perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijakan. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi dan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Strategi Stabilitas
- b. Strategi Pembangunan
- c. Strategi Efisiensi
- d. Strategi Pelayanan Publik
- e. Strategi Kombinasi

Adapun rencana strategis kegiatan pada OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah **“Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk”**.

B. Visi dan Misi

1. Visi

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah, visi pembangunan yang ingin di wujudkan adalah **“Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya”**

Visi, Misi OPD, merupakan konsekuensi logis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah, sebagai acuan untuk menjalankan program dan kegiatan, juga dapat berperan sebagai alat kendali untuk dijadikan tolak ukur

melaksanakan tugas lima tahun ke depan, serta dapat mencapai Visi, Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah dan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan baik.

2. Misi

Sebagai Upaya mewujudkan Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah, maka diimplementasikan dalam bentuk Misi ke 1 **“Meningkatkan taraf kesehatan, pendidikan dan kehidupan sosial, budaya masyarakat”**.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

1. Tujuan

Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk

2. Sasaran Strategis

Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana

D. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran Strategis dalam mencapai tujuan, hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dilihat di tabel 2.1 sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator RPJMD	Indikator Renstra	Formula	Sumber Data	Penanggung jawab
1	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana	Laju Pertumbuhan Penduduk	Total Fertility Rate (TFR) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persentase ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	$TFR = 5 \sum_{i=1}^{15} ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times K$ <p>TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur</p> <p>b_i = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur pada tahun tertentu p_i = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24,....., i=7 untuk kelompok umur 45-49) K = bilangan konstanta biasanya 1000</p> <p>Jumlah peserta KB Aktif Modern dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur dikali 100%</p> <p>Jumlah PUS yang ingin berKB tetapi tidak terlayani dibagi Jumlah PUS dikali 100%</p>	Dinas PP dan KB	Kepala Dinas PP dan KB

		Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	
		3. Persentase ASN yang tidak /sedang mendapat hukuman disiplin	100
		4. Persentase sarana dan sarana kantor kondisi baik	90
2	Meningkatnya pengendalian penduduk	1. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility rate/ASFR 15-19)	20
		2. Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25 tahun	21,0
		3. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	69,44
		4. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian	69,44
3	Terwujudnya Keluarga Berencana	1. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)	80
		2. Persentase fasilitasi kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	95,8
		3. Persentase peserta KB aktif (PA) metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	83
		4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	6,87

		5. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	39,95
		6. Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	95
		7. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	91,26
		8. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dengan kesertaan rendah	85
		9. Persentase kesertaan KB keluarga penerima Bantuan Iuran PBI	0,51
4	Terwujudnya Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	100
		2. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	98,37
		3. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	96,22
		4. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	98,30
		5. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	100
		6. Cakupan kelompok kegiatan yang	92,34

		melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	
		7. Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	92.28

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah 2023 diimplementasikan melalui 4 (empat) program yang merupakan program prioritas bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Program Utama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.672.466.081	APBD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.088.700	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.088.700	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.392.120.180	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.995.642.380	
	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	396.477.800	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	36.253.500	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	843.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.336.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.446.500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.628.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.720.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.720.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	222.260.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	216.540.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.720.000	
2	PROGRAM PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	102.000.000	
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	102.000.000	
3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.018.284.000	APBD
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.556.750.000	
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	80.000.000	
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000	

	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	364.000.000	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	882.750.000	
	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB)	1.376.600.000	
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	360.000.000	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.016.600.000	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.309.434.000	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	45.830.500	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	980.503.500	
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	97.600.000	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	87.900.000	
	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta hak-hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	97.600.000	

	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	775.500.000	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	675.500.000	
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	100.000.000	
4.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN dan KESEJAHTERAAN KELUARGA (KS)	5.379.982.000	
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi)	150.982.000	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	5.229.000.000	
	Total Anggaran	15.212.708.380	APBD+DAK

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Maksud dari pengukuran kinerja kegiatan yaitu : Mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan, yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok *input, output, outcomes, benefit dan impact*, menentukan satuan setiap kelompok indikator, menetapkan rencana tingkat capaian atau target, mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, dan menghitung rencana realisasi untuk mendapatkan prosentasi capaian kinerja.

Kebijakan Pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah, diarahkan untuk mendukung komitmen Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara global baik di Kabupaten, Provinsi maupun secara Nasional. Kebijakan peningkatan kualitas dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan Keluarga Berencana, dilakukan dengan melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

1. Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategik diperoleh capaian perjanjian kinerja Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian
Kinerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah Tahun
2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2023			CAPAIAN (%)
			SATUAN	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya penunjang urusan Pemerintah Daerah	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Persen	100	100	100
		2. Persentase Temuan Laporan atas hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100
		3. Persentase ASN yang tidak/sedang mendapat hukuman disiplin	Persen	100	100	100
		4. Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	Persen	90	91	101,44
2	Meningkatnya Pengendalian Penduduk	1. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	Persen	20		
		2. Median Usia Kawin pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25 tahun	Persen	21,0	20,6	98,10
		3. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	Persen	69,44	60	86,41
		4. Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	Persen	69,44	67	96,49

3	Terwujudnya Keluarga Berencana	1. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Persen	75	72,11	96,15
		2. Persentase fasilitas kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	Persen	95	93	97,89
		3. Persentase peserta KB aktif (PA) metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Persen	35,8	22,66	63,30
		4. Persentase pelayanan KB pasca persalinan	Persen	6,84	4,6	67,25
		5. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	39,92	30,23	75,73
		6. Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang Pengendalian penduduk	Persen	93	92	98,92
		7. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	91,23	98,43	107,89
		8. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dengan kesertaan rendah	Persen	83	53,18	64,07
		9. Persentase kesertaan KB keluarga penerima Bantian Iuran (PBI)	Persen	0,46	39,13	100
4	Terwujudnya Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1. Pusat Pelayanan Keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	Persen	100	100	100
		2. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	98,34	98	99,65
		3. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	96,22	80,6	83,77
		4. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	98,27	87,64	89,18

		5. Cakupan remaja dalam pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	Persen	100	100	100
		6. Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	92,31	61,53	66,67
		7. Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persen	92,22	78,18	84,78

Berdasarkan tabel 3.2 di atas dapat disampaikan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat beberapa sasaran, yang antara lain yaitu :

1. Meningkatnya penunjang urusan Pemerintah Daerah

Sasaran ini merupakan program rutin yang yang dituangkan dalam 5 (lima) kegiatan, dengan rincian keberhasilan masing-masing kegiatan dapat dilihat dari capaian kinerja indikator :

- **Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.**

Dari indikator kinerja tersebut pada tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menargetkan sebesar 100 persen dengan realisasi sebesar 100 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 100 persen.

- **Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti.**

Dari indikator tersebut pada tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menargetkan sebesar 100 persen dengan realisasi sebesar 100 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 100 persen.

➤ **Persentase ASN yang tidak/sedang mendapat hukuman disiplin.**

Dari indikator tersebut pada tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menargetkan sebesar 100 persen dengan realisasi sebesar 100 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 100 persen.

➤ **persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik**

Dari indikator tersebut pada tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menargetkan sebesar 90 persen dengan realisasi sebesar 100 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 101,44 persen.

2. Meningkatnya Pengendalian Penduduk

Sasaran ini merupakan Program Pengendalian Penduduk yang hanya terdapat dalam 1 (satu) kegiatan, dengan rincian keberhasilan capaian kinerja indikator pada program ini antara lain :

➤ **Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age specifik Fertility Rate/ ASFR 15-19)**

Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age specifik fertility Rate/ASFR 15-19) pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 20 persen dengan realisasi sebesar persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar persen.

➤ **Median Usia Kawin pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25 tahun**

Media Usia Kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25 tahun pada 2023 ditargetkan sebesar 21 persen dengan realisasi 20,6 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 98,10 persen.

➤ **Presentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB**

Presentase Perangkat Dearah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 69,44 persen dengan realisasi 50 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 72,00 persen .

➤ **Presentase Perangkat Dearah (Dinas/Badan) Yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk**

Presentase Perangkat Dearah (Dinas/Badan) Yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk pada tahun 2023 ditargetkan 69,44 persen dengan realisasi 55 persen atau dengan nilai capaian sebesar 79,21 persen.

3. Terwujudnya Keluarga Berencana

Sasaran ini merupakan Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) yang terdapat dalam 4 (empat) kegiatan, dengan rincian keberhasilan capaian kinerja indikator pada program ini antara lain :

➤ **Presentase Masyarakat Yang Terpapar Isi Pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)**

Presentase Masyarakat Yang Terpapar Isi Pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE) pada tahun 2023 ditargetkan 75 persen dengan realisasi sebesar 72,11 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 96,15 persen.

➤ **Presentase Masyarakat Yang Terpapar Isi Pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)**

Presentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) Yang Siap Melayani KB MKJP pada tahun 2023 ditargetkan 95 persen dengan realisasi sebesar 93 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 97,89 persen.

➤ **Presentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**

Presentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada tahun

2023 ditargetkan sebesar 35,8 persen dengan realisasi sebesar 22,66 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 63,30 persen.

➤ **Presentase Peserta KB Pasca Persalinan**

Presentase Peserta KB Pasca Persalinan pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 6,84 persen dengan realisasi 4,6 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 67,25 persen.

➤ **Presentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi**

Presentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi pada tahun 2023 dengan target 39,92 persen dengan realisasi sebesar 38,80 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 97,19 persen.

➤ **Cakupan PKB/PLKB Yang di Dayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk**

Cakupan PKB/PLKB Yang di Dayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 93 persen dan dengan realisasi sebesar 92 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 98,92 persen.

➤ **Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat**

Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat pada tahun 2023 dengan target sebesar 91,23 persen dan dengan realisasi sebesar 98,43 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 107,89 persen.

➤ **Presentase Kesertaan KB di Kabupaten Dengan Kesertaan Rendah**

Presentase Kesertaan KB di Kabupaten Dengan Kesertaan Rendah pada tahun 2023 dengan target 83 persen dan dengan realisasi sebesar 53,18 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 64,07 persen.

➤ **Presentase Kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)**

Presentase Kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada tahun 2023 dengan target sebesar 0,46 persen dengan realisasi sebesar 39,13 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 100 persen.

4. Terwujudnya Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Sasaran ini merupakan Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) yang tertuang dalam 1 (satu) kegiatan, dengan rincian keberhasilan capaian kinerja indikator pada program ini antara lain :

➤ **Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan**

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100 persen dan dengan realisasi sebesar 100 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 100 persen.

➤ **Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB**

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 98,34 persen dan dengan realisasi 98 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 99,65 persen.

➤ **Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB**

Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB pada tahun 2023 ditargetkan 96,22 persen dan dengan realisasi sebesar 80,6 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 93,77

➤ **Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB**

Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 98,27 persen dan dengan realisasi 87,64 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 89,18 persen.

➤ **Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja / Mahasiswa**

Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja / Mahasiswa pada tahun 2023 target sebesar 100 persen dan realisasi sebesar 100 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 100 persen.

➤ **Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga**

Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 92,31 persen dan dengan realisasi sebesar 90 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 97,50 persen.

➤ **Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita dan Anak Yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak**

Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita dan Anak Yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 92,22 dan realisasi sebesar 91 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 98,68 persen

2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategik diperoleh capaian Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021–2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Meningkatnya penunjang urusan Pemerintah Daerah	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Persen	100	100	100
		2. Persentase Temuan Laporan atas hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100
		3. Persentase ASN yang tidak/sedang mendapat hukuman disiplin	Persen	100	100	100
		4. Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Persen	100	100	101,44
Rata-rata Capaian Kinerja				100	100	100
2	Meningkatnya Pengendalian Penduduk	1. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	Persen	100	245,45	245,45
		2. Median Usia Kawin pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25 tahun	Persen	100	97,14	98,1

		3. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	Persen	90	90,01	86,41
		4. Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	Persen	96	99,01	96,49
Rata-rata Capaian Kinerja				96,5	132,9	131,61
3	Terwujudnya Keluarga Berencana	1. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBP (Advokasi dan KIE)	Persen	100	142,86	96,15
		2. Persentase fasilitas kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	Persen	99,02	107,53	97,89
		3. Persentase peserta KB aktif (PA) metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Persen	67,95	100	63,3
		4. Persentase pelayanan KB pasca persalinan	Persen	72	67,54	67,25
		5. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	100	80,22	75,73
		6. Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang Pengendalian penduduk	Persen	80	100	98,92

		7. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	95,61	98,43	107,89
		8. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dengan kesertaan rendah	Persen	52,84	100	64,07
		9. Persentase kesertaan KB keluarga penerima Bantian Iuran (PBI)	Persen	85,68	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja				83,67	99,77	85,69
4	Terwujudnya Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1. Pusat Pelayanan Keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	Persen	100	100	100
		2. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	100	99,68	99,65
		3. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	100	99,8	83,77
		4. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	100	99,76	89,18
		5. Cakupan remaja dalam pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	Persen	100	100	100
		6. Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	100	99,71	66,67
		7. Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persen	100	99,76	84,78
Rata-rata Capaian Kinerja				100	99,81	81,30
Rata-rata Capaian Kinerja Keseluruhan				93,29	105,34	99,65

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah dapat dilita dari tiap sasaran, yang diantaranya yaitu :

Dari sasaran “Meningkatnya penunjang urusan Pemerintah Daerah” dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dengan rata-rata tingkat capaian 100 persen, hal ini dikarenakan pada sasaran ini merupakan program rutin pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan membuktikan bahwa capaian kinerja pada sasaran ini dalam katagori sangat baik.

Dari sasaran yang ke dua “Meningkatnya Pengendalian Penduduk” dari tahun 2021 sampai tahun 2023, pada tahun 2022 capaian kinerja ini mengalami kenaikan namun pada tahun 2023 mengalami penurunan capaian namun hal ini tidak mempengaruhi kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana karena tingkat capaian kinerja pada sasaran ini masih sangat baik.

Dari sasaran yang ketiga “Terwujudnya Keluarga Berencana” dari tahun 2021 sampai tahun 2022 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan, namun rata-rata pencapaian kinerja pada sasaran ini masih baik.

Dari sasaran keempat “Terwujudnya Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), dari tahun 2021 sampai tahun 2022 mengalami kenaikan namun pada tahun 2023 mengalami penurunan, namun hal ini tidak mempengaruhi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana karena rata-rata capaian kinerja masih sangat baik. Untuk rata-rata seluruh capaian kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah masih sangat baik.

3. Pengukuran Capaian Kinerja Program 2023 dengan Renstra Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan Perjanjian Kinerja, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah selama tahun anggaran 2023 telah melaksanakan 4 Program Kerja Utama. Keempat program kerja dimaksud dalam Perjanjian Kinerja juga mendukung terlaksananya Program Renstra Tahun 2023. Adapun perbandingan capaian target dan realisasi kinerja program kerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan Renstra Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 3.10 Perbandingan Target dan Realisasi Program Kerja Utama pada Perjanjian Kinerja dengan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2023		CAPAIAN (%)
		TARGET RENSTRA	REALISASI PK	
2	3	5	6	7
Meningkatnya penunjang urusan Pemerintah Daerah	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100	100	100
	2. Persentase Temuan Laporan atas hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100	100	100
	3. Persentase ASN yang tidak/sedang mendapat hukuman disiplin	100	100	100
	4. Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	90	91	101,44

Meningkatnya Pengendalian Penduduk	1. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	20		100
	2. Median Usia Kawin pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25 tahun	21,0	20,6	98,10
	3. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	69,44	60	86,41
	4. Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	69,44	67	96,49
Terwujudnya Keluarga Berencana	1. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)	75	72,11	96,15
	2. Persentase fasilitas kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	95	93	97,89
	3. Persentase peserta KB aktif (PA) metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	35,8	22,66	63,30
	4. Persentase pelayanan KB pasca persalinan	6,84	4,6	67,25
	5. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	39,92	30,23	75,73
	6. Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang Pengendalian penduduk	93	92	98,92
	7. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	91,23	98,43	107,89

	8. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dengan kesertaan rendah	83	53,18	64,07
	9. Persentase kesertaan KB keluarga penerima Bantian Iuran (PBI)	0,46	39,13	100
Terwujudnya Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1. Pusat Pelayanan Keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	100	100	100
	2. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	98,34	98	99,65
	3. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	96,22	80,6	83,77
	4. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	98,27	87,64	89,18
	5. Cakupan remaja dalam pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	100	100	100
	6. Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	92,31	61,53	66,67
	7. Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	92,22	78,18	84,74
Rata-rata capaian				99,65

Dari tabel 3.10 diatas, dapat dilihat bahwa program kerja pendukung pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 secara rata-rata menunjukkan persentase capaian kinerja sebesar 99,65%. Dengan capaian itu, dapat dikatakan program kerja pendukung dapat dikatakan berhasil.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Dengan Target Nasional/Provinsi

Untuk melihat bagaimana tingkat keberhasilan realisasi kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah, maka diperlukan adanya perbandingan dengan standar nasional ataupun target provinsi, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Nasional/Provinsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2023		CAPAIAN (%)
		TARGET PROVINSI	REALISASI PK	
2	3	5	6	7
Meningkatnya penunjang urusan Pemerintah Daerah	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	-	100	100
	2. Persentase Temuan Laporan atas hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	-	100	100
	3. Persentase ASN yang tidak/sedang mendapat hukuman disiplin	-	100	100
	4. Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	-	91	101,44
Meningkatnya Pengendalian Penduduk	1. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	29	51,6 *	*
	2. Median Usia Kawin pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25 tahun	21,0	20,6	98,10
	3. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	-	60	86,41

	4. Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	-	67	96,49
Terwujudnya Keluarga Berencana	1. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)	75	72,11	96,15
	2. Persentase fasilitas kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	-	93	97,89
	3. Persentase peserta KB aktif (PA) metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	24,0	22,66	63,30
	4. Persentase pelayanan KB pasca persalinan	-	4,6	67,25
	5. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	-	30,23	75,73
	6. Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang Pengendalian penduduk	-	92	98,92
	7. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	-	98,43	107,89
	8. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dengan kesertaan rendah	83	53,18	64,07
	9. Persentase kesertaan KB keluarga penerima Bantian Iuran (PBI)	-	39,13	100
Terwujudnya Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1. Pusat Pelayanan Keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	-	100	100
	2. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	-	98	99,65
	3. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	-	80,6	83,77
	4. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	-	87,64	89,18
	5. Cakupan remaja dalam pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	-	100	100

	6. Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	-	61,53	66,67
	7. Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	-	78,18	84,78

* Capaian tahun 2022

Dari tabel 3.11 diatas dapat dilihat bahwa pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah terdapat beberapa indikator yang dapat dibandingkan dengan target provinsi, yang diantaranya yaitu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age spesifik Fertility Rate/ ASFR 15-19), Median Usia Kawin pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25 tahun, Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE), Persentase peserta KB aktif (PA) metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan Persentase kesertaan KB di Kabupaten dengan kesertaan rendah.

Dari beberapa indikator tersebut sudah ada yang sesuai dengan target dan capaian indikator kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah walaupun capaian kerjanya masih kurang namun secara keseluruhan sudah baik.

5. Analisis Keberhasilan / Kegagalan Kinerja

Keberhasilan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah untuk kinerja tahun 2023, dapat ditunjukkan dengan tercapainya target-target yang telah ditetapkan pada setiap sasaran strategis yang ada.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah terdapat 4 sasaran yang menunjang keberhasilan kinerja, yang diantaranya yaitu :

1. Meningkatnya penunjang urusan Pemerintah Daerah

Dari sasaran tersebut nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 100 persen yang terdiri dari 4 indikator dan merupakan kegiatan rutin pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menunjang keberhasilan kegiatan-kegiatan teknis lainnya. Dari rata-rata capaian kinerja tersebut sudah menunjukkan katagori sangat baik.

2. Meningkatnya Pengendalian Penduduk

Pada sasaran “Meningkatnya Pengendalian Penduduk” rata-rata capaian kinerja yaitu 131,61 persen yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja, dari rata-rata capaian kinerja tersebut sudah menunjukkan katagori yang sangat baik.

- Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age specifik fertility rate/ASFR 15-19)

ASFR 15–19 tahun didefinisikan sebagai banyaknya kelahiran per 1.000 perempuan berumur 15-19 tahun. Pada tahun 2023 capaian indikator tersebut sebesar 51,6 Persen (capaian tahun 2022).

- Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25 tahun.

Median usia kawin pertama perempuan Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia. Pada tahun 2023 MUKP Kabupaten Lampung Tengah mencapai 20,6 dari target 21 hal ini menunjukkan bahwa MUKP di Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan hasil yang baik.

3. Terwujudnya Keluarga Berencana

Pada sasaran ini rata-rata capaian kinerja yang diperoleh yaitu 88.07 persen yang terdiri dari 9 (sembilan) indikator yang merupakan program teknis yang berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dari rata-rata capaian kinerja tersebut sudah menunjukkan katagori baik. Dari 9 (sembilan) indikator tersebut terdapat beberapa indikator yang sangat menunjang keberhasilan kinerja, yang diantaranya yaitu :

- Persentase Fasilitas kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP

Pada tahun 2023 fasilitas kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP memiliki target sebesar 95 persen dari jumlah faskes yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Dari target tersebut capaian yang diperoleh yaitu 97,89 persen dari jumlah faskes, hal ini menunjukkan hampir semua faskes yang ada siap untuk melayani KB MKJP dan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

- Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) merupakan metode kontrasepsi dengan tingkat keefektifan yang tinggi dengan tingkat kegagalan yang rendah serta komplikasi dan efek samping yang lebih sedikit dibandingkan metode kontrasepsi yang lain. MKJP merupakan jenis kontrasepsi yang sekali pemakaiannya dapat bertahan selama 3 tahun sampai seumur hidup. Terdapat berbagai jenis MKJP seperti IUD, implan, medis operatif wanita (MOW) dan medis operasi pria (MOP). Pada tahun 2023 PA MKJP memiliki target 24 persen dengan tingkat capaian sebesar 22,66 persen atau sebesar 63,30 persen.

Dari capaian tersebut peserta KB MKJP masih dalam katagori sedang dan masih perlu ditingkatkan lagi penyuluhan dan penggerakan terhadap Pasangan Usia Subur terkait penggunaan KB metode kontrasepsi jangka panjang untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut.

➤ **Persentase tingkat keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi**

Pada indikator ini tahun 2023 capaian kinerja yang diperoleh yaitu sebesar 75,73 persen dari target 39,92 persen. Dari capaian tersebut sudah dalam katagori baik, dan perlu ditingkatkan kembali agar capaian kinerja tersebut dapat berhasil dengan sangat baik.

4. Terwujudnya Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Pada sasaran kinerja diatas rata-rata capaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2023 sebesar 81,30 persen yang terdiri dari 7 indikator. Dari rata-rata capaian kinerja pada sasaran tersebut sudah dalam katagori baik.

Dari 4 (empat) sasaran kinerja yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah tingkat rata-rata capaian kinerja yang diperoleh yaitu 99,65 persen dan hal ini sudah menunjukkan keberhasilan yang dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan sudah dalam katagori yang sangat baik.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya yang Dikaitkan dengan Capaian Kinerja yang Telah Dicapai

Penggunaan sumber daya yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Lampung Tengah yaitu efisiensi sumber daya dana dan sumber daya manusia. Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya yang dikaitkan dengan capaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah untuk Tahun Anggaran 2023 pada tabel berikut:

Tabel 3.11 Perbandingan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

SASARAN RPJMD	PROGRAM KERJA UTAMA	SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2		4	5	6	7	8
Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan yang berlaku	100	97,30	2,7
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah dokumen keuangan yang disusun	100	97,45	2,55
		Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Kebutuhan layanan umum perangkat daerah	100	77,40	22,6
		Meningkatnya Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah	100	99,90	0,1
		Meningkatnya Pemeliharaan Barang milik daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	101,44	99,20	0,8

	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatnya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	100	100	0
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya Advokasi dan KIE Keluarga Berencana	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)	99,40	88,01	11,39
		Meningkatnya pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase meningkatnya keterampilan dan pengetahuan petugas penyuluh KB	100	82,04	17,96
		Meningkatnya pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Angka CPR	97,20	71,63	25,57
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Persentase meningkatnya keterampilan dan pengetahuan petugas penyuluh KB	99,88	94,37	5,51

	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok PIK remaja yang memperoleh pembinaan	100	95,54	0,46
--	--	--	--	--	-----	-------	------

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah sepanjang Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan program kerja utama dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator rata – rata 100%, dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, bahkan terdapat indikator yang menunjukkan efisiensi anggaran pada Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, dengan efisiensi anggaran mencapai 25,57%, namun secara umum program pembinaan Keluarga Berencana (KB) telah berhasil dalam program pelayanan keluarga berencana dengan menunjukkan capaian kinerja 97,20% yang merupakan tingkat capaian kinerja yang sangat baik. Sedangkan pencapaian efisiensi paling rendah terdapat pada Program Pengendalian Penduduk yaitu sebesar 0%, dengan tingkat keberhasilan program sebesar 100%

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pada tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah memiliki 4 program yang diantaranya terdapat 1 program rutin dan 3 program teknis. Dari ketiga program teknis tersebut terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang dijalankan oleh masing-masing Bidang yang diantaranya Program Pengendalian Penduduk yang diampu oleh Bidang Pengendalian Penduduk, program Pembinaan Keluarga Berencana yang diampu oleh Bidang

Keluarga Berencana dan Bidang penyuluhan Penggerakan serta program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

Dari ketiga program teknis yang dijalankan tersebut terdapat beberapa indikator dengan rata-rata capaian kinerja yang mencapai 100% yaitu program Pengendalian Penduduk. Sedangkan untuk program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dari indikator kinerja serta pendanaan yang telah ditargetkan rata-rata terealisasi 88,07% dan program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera terealisasi dengan rata-rata capaiannya yaitu 81,30%. Dari capaian kinerja ketiga program tersebut secara keseluruhan dapat dilihat hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tersebut dalam katagori sangat baik.

Dari program dan kegiatan serta sub kegiatan yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, kegiatan tersebut antara lain yaitu :

- Kegiatan peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Kegiatan ini merupakan kegiatan penggerakan KB baik itu yang MKJP maupun jenis kontrasepsi yang non MKJP. Dalam kegiatan ini terdapat pelayanan KB yang dilaksanakan bertempat di faskes-faskes dan tempat pelayanan KB lainnya. Selain itu kegiatan ini juga telah melakukan inovasi dengan melakukan pelayanan KB keliling oleh Tim KB Keliling (TKBK) yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat (Pasangan Usia Subur) sampai ketinggian kampung ataupun Dusun yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, dengan bersinergi dengan adanya program Bupati Ngantor di Dusun (Bunga Kampung Mekar Di Dusun). Dengan begitu hal ini sangat mendukung dan

menjadi salah satu penunjang keberhasilan dengan peningkatan capaian kinerja.

- Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas

Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat mendukung keberhasilan kinerja, karena kegiatan ini merupakan kegiatan penggerakan kampung KB untuk mendukung Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung KB. Sampai dengan tahun 2022 kampung KB yang terbentuk baru 43 kampung KB, namun sekarang di tahun 2023 kampung KB telah terbentuk sebanyak 130 kampung yang tersebar di 28 kecamatan dan ini masih terus ditingkatkan.

- Selain itu pada tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan inovasi dalam penurunan angka stunting yang dituangkan dalam kegiatan Konsentrasi Remaja Cegah Stunting (Konser Ceting). Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang melibatkan para remaja diantaranya Saka Kencana (Pramuka), Generasi Berencana (Genre), dan PIK-R, yang kegiatannya berupa perkemahan yang didalamnya mengusung tema pencegahan stunting dan diedukasi oleh para remaja yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut diadakan di daerah yang Lokus stunting sehingga dalam kegiatan tersebut diharapkan kepada masyarakat dapat mengetahui dan melakukan pencegahan stunting sejak dini.

B. Realisasi Anggaran

Prinsip akuntabilitas terkait erat dengan pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas kegiatan, dalam tercapainya sasaran/target kebijakan/pogram yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah daerah, sangat terkait erat dengan akuntabilitas keuangan, dimana yang dimaksud dengan **akuntabilitas keuangan** merupakan suatu pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah **laporan keuangan** yang terkait dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang/biaya oleh instansi pemerintah daerah tersebut yang melaksanakan program/ kegiatan.

Setiap OPD dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangannya memerlukan sumber dana. Sumber dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2023 berasal dari dana APBD dan DAK Kabupaten Lampung Tengah. Total jumlah anggaran sebesar **Rp.15.212.708.380,- (Lima belas milyar dua ratus dua belas juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)**, dimana dana tersebut terdiri dari belanja operasi sebesar **Rp.15.115.108.38,- (Lima belas milyar seratus lima belas juta seratus delapan ribu tiga puluh delapan rupiah)** dan belanja modal sebesar **Rp. 97.600.000 (Sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)**.

Tabel 3.12 Realisasi Keuangan Pelaksanaan Anggaran
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Lampung Tengah

NO	KEGIATAN	JUMLAH DANA ANGGARAN	REALISASI 2023
I	BELANJA OPERASI	15.115.108.380	13.757.710.610,65
1	Belanja Pegawai	4.198.922.380	4.068.238.096,74
2	Belanja Barang dan Jasa	10.916.186.000	9.689.472.513,91
II	BELANJA MODAL	97.600.000	93.913.777
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	97.600.000	93.913.777
Jumlah Total		15.212.708.380	14.001.624.388

Pencapaian kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Untuk belanja langsung, dana yang terealisasi sampai dengan 31 Desember 2023 **Rp. 14.001.624.388** dari pagu anggaran sebesar **Rp.15.212.708.380,-** dengan persentase keuangan sebesar **92,04%**, yang keseluruhannya digunakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Tahun 2023.

Tabel 3.13 Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	DANA			
			REALISASI (Rp)	(%)	SISA (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.712.442.380	4.590.404.398	97	122.037.982	3
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.088.700	3.978.500	97	110.200	3

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.088.000	3.978.500	97	110.200	3
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.392.120.180	4.280.226.597	97	111.893.583	3
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.995.642.380	3.892.478.097	97	103.164.283	3
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	396.477.800	387.748.500	98	8.729.300	2
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	36.253.500	28.058.00	77	8.195.500	23
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	843.000	790.000	94	53.000	4
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.336.000	1.290.000	97	46.000	3
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.446.500	0	0	5.446.500	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.628.000	25.978.000	91	2.650.000	9
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.720.000	57.661.201	100	58.799	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.720.000	57.661.201	100	58.799	0
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.260.000	220.480.100	99	1.779.900	1
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	216.540.000	214.856.200	99	1.683.800	1
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.720.000	5.623.900	98	96.100	2
II	Program Pengendalian Penduduk	102.000.000	102.000.000	100	-	-

	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	102.000.000	102.000.000	100	-	-
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	102.000.000	102.000.000	100	-	-
III	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.018.284.000	4.169.389.990	83	848.894.010	17
	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.556.750.000	1.370.170.613	88	186.579.387	12
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	80.000.000	79.934.000	100	66.000	0
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000	127.057.695	85	22.942.305	15
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	364.000.000	298.092.218	82	65.907.782	18
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	882.750.000	808.181.700	92	74.568.300	8
	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	56.905.000	71	23.095.000	29
	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.376.600.000	1.129.390.000	82	247.210.000	18
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	360.000.000	352.500.000	98	7.500.000	2
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.016.600.000	776.890.000	76	239.710.000	24

	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.309.434.000	938.005.377	72	371.428.623	28
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	45.830.500	38.850.000	85	6.980.500	15
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	980.503.500	630.536.000	64	349.967.500	36
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Retensi)	97.600.000	93.913.777	96	3.686.223	4
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	87.900.000	80.929.000	92	6.971.000	8
	Promosi dan konseling kesehatan reproduksi serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan	97.600.000	93.776.600	96	3.823.400	4
	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	775.500.000	731.824.000	94	43.676.000	6
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	675.500.000	656.124.000	97	19.376.000	3
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	100.000.000	75.700.000	76	24.300.000	24
IV	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	5.379.982.000	5.139.830.000	96	240.152.000	4

	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5.379.982.000	5.139.830.000	96	240.152.000	4
	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS	150.982.000	127.250.000	84	23.732.000	16
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS	5.229.000.000	5.012.580.000	96	216.420.000	4
	Jumlah	15.212.708.380	14.001.624.388	92	1.211.083.992	8

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam mengukur keberhasilan suatu kegiatan, indikator kinerja yang digunakan berupa indikator kinerja *input*, *output* dan *outcome*. Dalam kaitan deduktif, maka capaian indikator sasaran, umumnya dikaitkan dengan capaian output/outcome kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat.

Dari hasil uraian bab-bab sebelumnya mengenai capaian kinerja, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2023 untuk 27 (Dua puluh tujuh) sub kegiatan yang telah dianggarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat 21 (dua puluh satu) sub kegiatan yang nilai pencapaian realisasinya 90 persen sampai dengan 100 persen dan Terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yang nilai pencapaiannya 60 persen sampai 80 persen.
2. Terdapat 1 (satu) sub kegiatan nilai pencapaian realisasinya 0% yaitu sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dikarenakan ketidakpahaman dalam pemesanan melalui sistem LPSE yang baru diterapkan pada tahun 2023 sehingga belanja yang dimaksud tidak terealisasi

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Melihat dari capaian kinerja kegiatan operasional Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah, di Tahun 2023 rata - rata sebesar **90,73 %**, hal ini menunjukkan capaian kinerja sudah dalam katagori sangat baik.

Berikut ini penjelasan terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang nilai capaian realisasi terhadap anggarannya

yang masih 0%, yaitu pada sub kegiatan Penyediaan Biaya Barang Cetak dan Penggandaan, hal ini disebabkan karena ketidakpahaman dalam pemesanan melalui sistem LPSE yang baru diterapkan pada tahun 2023 sehingga belanja yang dimaksud tidak terealisasi.

Untuk peningkatan kinerja yang lebih baik lagi di tahun yang akan datang, sebaiknya penganggaran yang direncanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah harus lebih efisien dan efektif, sedapat mungkin disesuaikan dengan kerangka acuan yang dibuat, sehingga sesuai dengan apa yang kita harapkan baik jadwal maupun pelaksanaannya dan kepekaan, kemampuan, dan kecerdasan sumber daya manusia baik saat perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban semakin ditingkatkan.

Akhir kata, dalam penyusunan LAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 ini, sangat disadari masih jauh dari sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan/kekurangan, maka kami sangat mengharapkan saran perbaikan dalam hal penyempurnaannya dimasa yang akan datang.

Selanjutnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tim, staf serta pihak yang telah terlibat dan membantu dalam pelaksanaan penyusunan laporan ini, dan semoga LAKIP yang telah tersusun dapat bermanfaat untuk berbagai pihak yang memerlukan data – data dalam laporan ini.

Gunung Sugih, Januari 2024

Plt.KEPALA DINAS PENGENDALIANPENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



